

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA
(Studi Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum
(UIN) Alauddin Makassar

Oleh :

HILMIAH

NIM.10400115021

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hilmiah
NIM : 10400115021
Tempat/ Tgl Lahir : Pinrang/ 05 September 1997
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Penelitian : Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi
Putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kedasaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil kasrya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan rujuk berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Samata, 26 Juni 2019

Penyusun

Hilmiah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul **"Proses Penyelesaian Perkara Persuungan Usaha (Studi Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009)"** yang disusun oleh Hilmiyah, NIM: 10400115021, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 02 Juli 2019 M
28 Syawal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
Sekertaris : Istiqamah, S.H., M.H.
Munaqisy I : Dr. Andi Safrani, S.H., M.H.
Munaqisy II : Ashur Senilele, S.H., M.H.
Pembimbing I : Dr. Marilang, S.H.M.Hum
Pembimbing II : Erlina, S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Segala puji Allah *Subhana wata'ala*, Rabb bagi seluruh alam semesta, yang memberi nikmat bagi setiap manusia nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat tak kalah pentingnya nikmat keimanan yang dititipkan pada insanpilihanNya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* yang telah membawa kita kejalan yang lurus seperti yang kita rsakan saat ini.

Skripsi ini berjudul Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU, Putusan Pengadilan Negeri Makassar, dan Putusan Mahkamah Agung merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) program studi Ilmu Hukum pada fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dengan pertolongan Allah SWT dan do'a orangtua yang selalu menyertai penulis membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Dr.Marilang., S.H., M.Hum dan ibunda Dra. Suharti atas do'a, dukungan, cinta dan kasih yang tak

pernah putus diberikan yang tidak mampu penulis membalasnya hingga kapanpun. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada saudara-saudara penulis (Ulfah, Muh. Alwan, Awaluddin, Wahyu, dan Rahmat) yang tidak dapat dipungkiri bahwa mereka adalah bagian dari motivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Dr.Marilang.,S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I dan ibu Erlina., S.H., M.H selaku pembimbing II atas segala arahan, petunjuk, motivasi, dan bimbingan yang diberikan dengan penuh kesabaran hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada dosen penguji dalam ujian skripsi ini yakni Ibu Dr. A. Safriani., S.H.,M.H selaku penguji I dan Bapak Ashar Sinilele.,S.H., M.H selaku penguji II.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga, sahabat, dan rekan-rekan yang telah memberi motivasi, nasihat , saran dan kritik yang membangun kepada penulis sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terimakasih dan hormat setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari., M.Si, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;

3. Ibu Istiqamah, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar;
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
5. Keluarga besar VON15 Angkatan 2015 Ilmu hukum terimakasih atas motivasi dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis;
6. Teman-teman kelas Ilmu Hukum A terkhusus kepada teman-teman yang telah menemani hari-hari penulis selama perkuliahan.
7. Teman-Teman Praktek Pengenalan Lapangan Penulis yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis;
8. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Ang. 60 Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba terimakasih karena telah bersama-sama mengabdikan menciptakan kenangan.
9. Sahabat-sahabat penulis Hajrahwati Gama, Nuraeni, St. Nurhaliza Zabri, Alvi Anggriani, A. Astri Surya Ramadani, dan Masyhurah tim menyusun yang tiada henti memberi motivasi dan dukungannya yang sangat besar hingga akhir penulisan skripsi ini. Tim yang tiada henti meluangkan waktunya untuk penulis serta cinta dan kasih yang diberikan yang tidak bisa penulis sampaikan karena telah tersimpan dan terpatrit dalam hati penulis.
10. Teman-teman tim *humble*, Musfita Sari, Mahdiyah, Ratna Febriany, Dedi Aswandi, Mahfud Arya Wardana, Syahiruddin dan Herul yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi penulis.
11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa

penulis sebutkan satu persatu.

Dengan penuh kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan agar dapat bermanfaat untuk semua orang.

Samata, Mei 2019
Penyusun

Hilmiah



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Tinjauan Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	9
1. Pengertian Persaingan, praktek Monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat	9
2. Sumber Hukum Persaingan Usaha	12
3. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha	15
4. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	16
a. Perjanjian yang Dilarang.....	16
b. Kegiatan yang Dilarang.....	27
B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	33
1. Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	33
2. Mekanisme Penanganan Perkara.....	36

C. Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU	45
1. Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU	45
2. Upaya Hukum Kasasi.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Sumber Data.....	49
D. Populasi dan Sampel	49
E. Metode Pengumpulan data.....	50
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	51
A. Kondisi Perkara yang Telah diputuskan KPPU	51
B. Dasar Hukum yang digunakan KPPU, Pengadilan Negeri Makassar, dan Mahkamah Agung.....	52
1. Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009.....	52
a. Duduk Perkara.....	52
b. Pertimbangan Hukum	55
c. Diktum/ Amar Putusan.....	63
2. Putusan Pengadilan Negeri Mks No. 1/Pdt.KPPU/2010/PN.Mks	
a. Pertimbangan Hukum	65
b. Diktum/ Amar Putusan.....	71
3. Putusan Mahkamah Agung No. 141 /K.Pdt.Sus/2011	72
a. Pertimbangan Hukum.....	72

b. Diktum/ Amar Putusan.....	74
C. Perbedaan Pertimbangan Hukum Majelis Komisi KPPU, dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dan Mahkamah Agung	76
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87



ABSTRAK

Nama : Hilmiah
Nim : 10400115021
Judul : Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan Pengadilan)

Pokok masalah yang penulis angkat pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Negeri Makassar, dan Mahkamah Agung terkait dugaan pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 19 huruf (a), (c), dan (d) UU No.5 Tahun 1999 terhadap jasa pelayanan taxi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kemudian dirumuskan dalam beberapa sub masalah yaitu : 1. Apakah dasar hukum yang digunakan Majelis Komisi KPPU, Pengadilan Negeri Makassar, dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara persaingan usaha tidak sehat dalam perkara Nomor 18/KPPU-I/2009 sehingga putusannya berbeda?, 2. Bagaimana perbedaan pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* yaitu metode penelitian dengan mengkaji berbagai literatur dimana yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPD Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, dan Mahkamah Agung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan putusan antara Majelis KPPU dan Hakim Mahkamah Agung dengan Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (d) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Maka merujuk dari hasil penelitian ini, Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusannya dinilai keliru sehingga perlu diluruskan. Sedangkan, KPPU dan Mahkamah Agung telah tepat dalam menjatuhkan putusannya sehingga perlu dipertahankan.

Kata kunci : Diskriminasi, Praktik Monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan hukum dibentuk adalah untuk menata aktivitas kehidupan manusia dalam segala aspek agar menjadi teratur. Khusus dalam aspek ekonomi dibentuklah perundang-undangan yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuannya tentu untuk menertibkan para pelaku usaha agar mereka tidak saling memonopoli dan membunuh usaha satu sama lain.

Demikianlah konsekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk oleh para pendiri negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) yang pada prinsipnya membantah dan meniadakan prinsip negara kekuasaan (*Machstaat*) yang wujudnya adalah setiap aspek kehidupan masyarakat, khususnya aspek ekonomi harus diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan dengan maksud agar persaingan usaha tidak sehat dapat ditiadakan, paling tidak diminimalisir agar para pelaku usaha dapat bersaing dengan sehat.

Apabila tingkat persaingan usaha antar pelaku usaha semakin rendah, maka pelaku usaha yang seharusnya bersaing seperti perjanjian untuk menetapkan harga, mengatur produksi, membagi wilayah penjualan akan meniadakan inovasi, menurunkan kualitas dan menyebabkan harga menjadi mahal. Sehingga kondisi ini hanya akan menguntungkan para pelaku usaha karena mendapatkan untung yang besar. Sebaliknya merugikan konsumen karena tidak dapat memilih,

sehingga hanya mendapatkan produk dengan harga yang lebih mahal dari seharusnya.

Pesatnya perkembangan dunia usaha perlu diimbangi dengan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang wajar. Pada akhirnya setiap orang akan menikmati iklim usaha yang dibangun atas dasar persaingan yang sehat dan fair.¹

Tindakan bersaing secara tidak sehat mungkin tidak akan mendapat tempat di Indonesia mengingat masyarakat Indonesia yang memiliki sifat yang tidak individualis dan senang bergotong-royong. Namun kenyataan pada era globalisasi dimana ilmu pengetahuan semakin berkembang, teknologi semakin canggih membuat masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk meningkatkan taraf hidup mereka masing-masing, Sehingga membuat pelaku usaha mencari cara agar tidak berkompetisi dan menimbulkan praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat.

Melihat kondisi tersebut di atas, maka diperlukan penataan kembali kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan cita-cita serta tujuan perekonomian Indonesia sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Anti Monopoli.

Undang-Undang Anti Monopoli merupakan kelengkapan hukum yang diperlukan dalam suatu perekonomian yang menganut mekanisme pasar. Disatu pihak Undang-Undang ini diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing

¹ St. Nurjannah, “Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal (Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)”, *Jurisprudentie*, Vol 4, No. 1 (2017), hlm. 2. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3669/5495> (Diakses 1 Januari 2019)

dalam perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan, dan di lain pihak Undang-Undang ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu untuk memagari agar tidak terjadi praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat dan tidak wajar.²

Pada beberapa kasus yang diadili oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pengadilan negeri Makassar serta Mahkamah Agung diketahui bahwa banyak pelaku usaha mempraktekkan perlakuan persaingan usaha tidak sehat yang menyebabkan perlakuannya berujung di pengadilan.

Upaya penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat dibutuhkan suatu tata cara penanganan perkara dibidang persaingan usaha tidak sehat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli. Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli, maka dibentuk suatu komisi yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Keputusan Presiden nomor 75 tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi. Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang.

Undang-Undang Anti Monopoli tersebut, selain mengatur ketentuan hukum materiil juga mengatur ketentuan hukum formil atau dinamakan dengan hukum acara persaingan usaha. Dalam hukum acara tersebut diatur mengenai tata cara penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, maupun Kepolisian.

²Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.

Beberapa ketentuan yang mengatur tentang hukum acara persaingan usaha dapat dijumpai pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Ketentuan Pasal 38 dan Pasal 46 dipertegas kembali melalui Keputusan presiden nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2008, peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum keberatan terhadap putusan komisi pengawas persaingan usaha.

Seperti yang telah disebutkan terdapat aturan mengenai tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Sebagaimana dalam penanganan perkara persaingan usaha setelah pemeriksaan lanjutan telah selesai dilakukan oleh KPPU maka selanjutnya akan dikeluarkan putusan komisi yang berisi tentang penilaian-penilaian oleh Majelis Komisi tentang terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. Putusan oleh Majelis Komisi tersebut kemudian dibacakan dalam persidangan dan diberikan salinannya kepada pelaku usaha. Agar pelaku usaha dapat membaca secara baik pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh KPPU dalam memutuskan. Sehingga pelaku usaha dapat pula mempertimbangkan untuk mengajukan keberatan atau tidak yang diatur secara jelas dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sementara peraturan teknisnya dapat dilihat pada perkara Nomor 18/KPPU-I/2009 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 19 huruf

(a), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin terkait jasa pelayanan taksi.

Berdasarkan Pasal 17 dan 19 tersebut jika dikaitkan dengan perkara Nomor 18/KPPU-I/2009 yang disidangkan di majelis peradilan ajudikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa PT. Agkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar terbukti secara sah melanggar ketentuan pasal 19 huruf (a) dan (d) sebagaimana dalam diktum putusannya yang berbunyi

1. Menyatakan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
2. Menyatakan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

PT. Agkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar merasa tidak diperlakukan secara adil oleh putusan KPPU tersebut, maka PT Angkasa Pura I mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri.

Ternyata diktum putusan KPPU dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar terhadap kasus persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar terdapat perbedaan secara prinsip, padahal keduanya sama-sama mendasarkan pada Pasal

17 dan 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terjadinya perbedaan antara putusan kedua jenis peradilan tersebut menimbulkan persoalan khusus bagi penulis yaitu “Bagaimana bisa terjadi perbedaan putusan antara dua jenis peradilan terhadap kasus yang sama?”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dengan pokok masalah “Bagaimana bisa terjadi perbedaan putusan antara dua jenis peradilan terhadap kasus yang sama” yang dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum yang digunakan Majelis Komisi KPPU, Pengadilan Negeri Makassar, dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara persaingan usaha tidak sehat dalam perkara Nomor 18/KPPU-I/2009 sehingga putusannya berbeda?
2. Bagaimana perbedaan pertimbangan hukum Komisioner KPPU dengan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Makassar dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada perbedaan putusan KPPU Makassar dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar, dan putusan Mahkamah Agung terkait dugaan pelanggaran pasal 17 dan 19 Undang-Undang Anti Monopoli yang dilakukan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

2. Deskripsi Fokus

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan masalah yang dijadikan fokus penelitian yaitu bahwa putusan KPPU melalui putusannya Nomor 18/KPPU-I/2009 menyatakan PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang menyatakan bahwa PT Angkasa Pura terbukti melanggar Pasal 19 huruf (a) dan (d) sementara Pengadilan Negeri Makassar melalui putusannya Nomor 01/Pdt.KPPU/2010/PN membatalkan putusan KPPU tersebut dengan menyatakan bahwa PT Angkasa Pura tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf (a) dan (d). Kemudian KPPU melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung yang menghasilkan putusan Nomor 141 K/Pdt.Sus/2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menimbang sendiri dengan menyatakan bahwa PT Angkasa Pura terbukti melanggar Pasal 19 huruf (a) dan (d).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum yang digunakan Majelis Komisi KPPU, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara persaingan usaha tidak sehat dalam perkara Nomor 18/KPPU-I/2009.
- b) Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU dengan pertimbangan hukum hakim

Pengadilan Negeri Makassar dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan:

- a) Dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata dan hukum persaingan usaha, khususnya mengenai antimonopoli.
- b) Dapat mengetahui bagaimana pertimbangan serta dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara persaingan usaha tidak sehat.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Pengertian Persaingan, praktek Monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat.

Pada sub bagian ini penulis akan menguraikan secara teoritis setiap kata demi kata yaitu persaingan, praktek monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat

a) Persaingan

Persaingan atau '*competition*' dalam bahasa Inggris oleh Webster didefinisikan sebagai "*.....a struggle or contest between two or more persons for the same objects*"³. Dengan mendasarkan pada terminologi 'persaingan' tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur yang tercantum di dalamnya, yaitu:⁴

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli;
2. Ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

Oleh karena setiap orang punya kebebasan untuk melakukan usaha, maka persaingan menjadi hal yang tak terhindarkan. Hal ini menjadikan persaingan adalah sebuah karakteristik sistem ekonomi pasar.

Persaingan usaha secara umum digambarkan sebagai kegiatan di mana beberapa pelaku usaha dengan kegiatan usaha yang sama, secara bersama-sama menjalankan kegiatan usahanya yang juga berada dalam sektor yang sama.

³ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 13.

⁴ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 13.

b) Praktik Monopoli

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat, lebih dulu akan dijelaskan mengenai pengertian tentang monopoli itu sendiri. Secara otentik pengertian monopoli telah disuratkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa monopoli adalah sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penguasaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Dengan demikian, jelas sekali bahwa monopoli menuntut terciptanya suatu penguasaan atas produksi, pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu atau satu kelompok pelaku usaha.

Kemudian praktik monopoli juga telah dirmuskan secara tegas melalui Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut bahwa praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 tersebut dapat diketahui bahwa praktek monopoli, paling tidak terdapat 4 unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu:⁵

⁵Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002) cet. 2 hlm. 17

- a) Adanya pemusatan ekonomi;
- b) Pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi;
- c) Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;
- d) Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum.

Praktek monopoli ditekankan pada proses monopoli yang dapat dilihat dari beberapa hal yaitu, penentuan mengenai pangsa pasar bersangkutan, penilaian terhadap keadaan pasar, serta adanya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menguasai pasar. Secara tegas, praktek monopoli merupakan proses pemusatan, sedangkan monopoli merupakan kondisi pasar akibat adanya praktek monopoli.

c) Persaingan usaha tidak sehat

Persaingan usaha tidak sehat diartikan sebagai perbuatan dimana di antara pelaku usaha terjadi persaingan secara tidak *fair*. Persaingan usaha tidak sehat telah dirumuskan secara jelas melalui Pasal 1 angka 6 undang-undang tersebut bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Sekalipun persaingan usaha tidak sehat secara tegas dilarang namun dalam praktek sering dilanggar oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran barang dan atau jasa tanpa memperdulikan betapa pentingnya

kejujuran dan ketaatan kepada aturan hukum dijunjung tinggi agar pelaku usaha dan publik tidak menjadi korban/dirugikan.

2. Sumber Hukum Persaingan Usaha

Sumber hukum persaingan usaha terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini merupakan aturan yang menjadi dasar hukum dilarangnya melakukan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie atas desakan *IMF (International Monetary Fund)* agar Indonesia secara komprehensif menyusun peraturan mengenai persaingan usaha.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk dengan tujuan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3 bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Sementara dalam doktrin, pakar hukum ekonomi mengemukakan secara sederhana bahwa tujuan dari hukum persaingan usaha terkait dengan objek yang dilindungi adalah:⁶

- a. Melindungi pelaku usaha terutama pelaku usaha yang tidak dominann;
- b. Melindungi konsumen dari ekonomi biaya tinggi di mana konsumen dihindari dari mengeluarkan biaya (tinggi) yang tidak sesuai dengan kualitas produk yang diterima;
- c. Melindungi Negara dari inefisiensi kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi kesejahteraan nasional;
- d. Melindungi proses persaingan usaha itu sendiri dalam arti melindungi sistem mekanisme pasar yang wajar yang didasarkan kepada berlakunya hukum alamiah penawaran dan permintaan (*supply and demand*) agar tidak terganggu oleh suatu tindakan pelaku usaha maupun kebijakan pemerintah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Selain mengatur mengenai hukum materil atau hukum persaingan usaha, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur hukum formal atau hukum acara persaingan usaha. Hukum acara persaingan usaha mencakup tata cara

⁶Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 20

⁷Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia* , hlm. 11

penanganan perkara persaingan usaha yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) maupun badan peradilan lainnya.

Hukum acara persaingan usaha tertuang pada pasal 38 sampai dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Pada pasal-pasal tersebut dijelaskan mengenai tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha, pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan, penyelidikan dan pemeriksaan, alat bukti, upaya keberatan ke pengadilan, dan penetapan eksekusi putusan perkara persaingan usaha. Lebih lanjut tentang tata cara penanganan perkara persaingan usaha, dalam upaya melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 maka ditetapkan peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara penanganan perkara di KPPU yang kemudian lebih lanjut disempurnakan melalui peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha no 1 tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas serta transparansi dalam pelaksanaan perkara persaingan usaha.

Mengenai tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang tatacara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebelumnya, pada saat Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 diberlakukan, belum ada peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Hal ini menimbulkan hambatan bagi Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan terhadap upaya hukum keberatan. Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 3 tahun 2005 ini mengatur mengenai tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU, tata cara pemeriksaan keberatan, pemeriksaan tambahan, serta pelaksanaan putusan.

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur tentang pertentangan kepentingan antar pelaku usaha dimana satu pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata. Namun pelanggaran terhadap hukum persaingan ini mempunyai unsur-unsur pidana bahkan administrasi. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian negara. Dalam konteks itulah ranah hukum privat menjadi hukum publik.⁸

3. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

Materi cakupan ruang lingkup hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 cukup luas. Terkait jenis perbuatan serta kegiatan yang dilarang hingga sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran tersebut. Singkatnya, tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu:

1. Bab III Perjanjian yang dilarang;
2. Bab IV Kegiatan yang dilarang;
3. Bab V Posisi Dominan;
4. Bab VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Bab VII Tata cara penanganan perkara;
6. Penegakan hukum;

⁸Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 11

7. Ketentuan-ketentuan lain;

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 dikelompokkan menjadi 11 bab, dituangkan dalam 26 bagian serta 53 pasal, secara detail sebagai berikut:

1. Bab I terdiri dari 1 pasal berisi tentang ketentuan umum;
 2. Bab II terdiri dari 2 pasal berisi tentang asas dan tujuan;
 3. Bab III terdiri dari 13 pasal berisi tentang perjanjian yang dilarang;
 4. Bab IV terdiri dari 8 pasal berisi tentang kegiatan yang dilarang;
 5. Bab V terdiri dari 5 pasal berisi tentang posisi dominan;
 6. Bab VI terdiri dari 8 pasal berisi tentang lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 7. Bab VII terdiri dari 9 pasal berisi tentang cara penanganan perkara;
 8. Bab VIII terdiri dari 3 pasal berisi tentang sanksi;
 9. Bab IX terdiri dari 2 pasal berisi tentang ketentuan lain;
 10. Bab X ketentuan peralihan;
 11. Bab XI ketentuan penutup
4. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- a) Perjanjian yang dilarang

Definisi perjanjian sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun baik tertulis ataupun tidak tertulis.

Pengertian tentang perjanjian di atas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan mengenai definisi perjanjian itu sendiri. Akan tetapi dalam hukum

monopoli, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar terkait pengertian perjanjian.

Perjanjian dalam teori persaingan usaha adalah upaya dua pelaku usaha atau lebih dalam konteks strategi pasar. Dengan demikian, esensi perjanjian adalah saling bersepakatnya antar pesaing tentang tingkah laku pasar mereka, baik seluruhnya ataupun menyepakati tingkah laku bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar. Akibatnya pesaing tidak lagi tampil secara terpisah dan tidak lagi mandiri di pasar.⁹

Tidak dapat dipungkiri, dalam dunia usaha saat ini bisa kita temukan banyak perjanjian dan kegiatan usaha yang mengandung unsur kecurangan dan kurang adil sehingga menimbulkan inefisiensi perekonomian seperti kesejahteraan yang hilang. Akibatnya keadilan ekonomi dimasyarakat menjadi terganggu.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah melarang adanya perjanjian antar pelaku usaha yang menimbulkan adanya persaingan tidak sehat. Aturan tersebut tercantum pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah:

- 1) Perjanjian yang bersifat oligopoli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia oligopoli berarti keadaan pasar dimana produsen penjual barang hanya sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat memengaruhi harga. Ciri-ciri pasar oligopoli diantaranya barang yang dijual biasanya barang yang homogen, struktur ditandai dengan kekuatan pelaku usaha yang biasanya sebanding, perusahaan dalam industri hanya sedikit,

⁹Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm.

pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi, serta kompetisi non harga. Kaidah ini diatur secara jelas dalam Pasal 4 sebagaimana bunyi selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- (2) Praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat patut diduga telah terjadi jika dua atau tiga pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar dari satu jenis barang atau jasa.

Pasar oligopoli sendiri ditandai dengan banyaknya pembeli dengan hanya beberapa penjual yang ada di pasar. Perjanjian antar pelaku usaha dalam struktur pasar oligopoli biasanya tidak terjadi secara lisan maupun tulisan. Namun umumnya terjadi karena keterkaitan reaksi tanpa adanya perjanjian, khususnya pada barang yang sifatnya homogen atau identik.

2) Perjanjian Penetapan Harga

Perjanjian ini dikenal dengan istilah *Price Fixing Agreement*. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli sangat jelas melarang adanya perjanjian penetapan harga antar produsen untuk menetapkan harga terhadap suatu barang atau jasa yang diperdagangkan yang harus dibayar oleh konsumen atau pembeli pada pasar bersangkutan yang sama. Perbuatan ini menimbulkan kerugian bagi konsumen di mana barang atau jasa yang ditawarkan dengan harga yang relatif tinggi dengan jumlah barang yang lebih sedikit. Penyebab perjanjian ini dilarang adalah karena perjanjian ini tidak memberi kesempatan kepada konsumen untuk mendapat produk dengan harga yang lebih murah sedangkan

dilain sisi pelaku usaha yang melakukan perjanjian dapat mencapai tujuannya yaitu memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya. Hal inilah yang dapat meniadakan persaingan usaha antara pelaku usaha yang mengadakan perjanjian.

Pada pasar oligopoli dalam praktiknya pelaku usaha atau pedagang yang memiliki posisi dominan pada pasar biasanya hanya memberikan tanda kepada pelaku usaha lainnya dengan menaikkan harga yang biasanya akan langsung diikuti oleh pelaku usaha lainnya. Perjanjian penetapan harga yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 termuat dalam Pasal 5 ayat 1 bahwa “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.

Sesuai dengan rumusan pasal di atas maka jenis perjanjian penetapan yang dilarang yaitu perjanjian penetapan harga antar pelaku di mana dalam hal ini dua pelaku usaha atau lebih membuat perjanjian baik secara lisan maupun tulisan untuk secara bersama-sama menentukan harga jual suatu produk yang akan dijual. Bahkan seperti penjelasan di atas tadi bahwa dalam pasar yang sifatnya oligopolis, pelaku usaha hanya memberikan tanda kepada pelaku usaha lainnya dengan menaikkan harga yang biasanya akan langsung diikuti oleh pelaku usaha lain. Cara lain yang biasanya dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan menerbitkan pengumuman atau pun artikel di media sebagai indikasi bahwa perlu adanya kenaikan harga di mana hal ini merupakan bentuk kolusi yang disamarkan (*tacit collusion*).

Perjanjian penetapan harga yang dilarang oleh sebagaimana tercantum pada Pasal 6 bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan /atau jasa yang sama”.

Bunyi pasal di atas melarang adanya perjanjian yang isinya penetapan harga yang berbeda (*price discrimination*) terhadap barang dan/atau jasa. Diskriminasi yang dimaksud adalah diskriminasi terhadap kedudukan para konsumen, dengan cara memberikan harga yang berbeda-beda terhadap barangatau jasa yang sama. Dalam praktiknya, perbedaan penetapan harga ini terjadi karena produsen telah memastikan bahwa konsumen telah mampu membayar dengan harga yang berbeda pada produk yang sama. Pelaku usaha terlebih dahulu elastisitas permintaan konsumen. Pelaku usaha membebankan harga yang lebih rendah pada permintaan yang lebih elastis dibandingkan dengan permintaan yang tidak elastis.

Tentu saja tidak semua harga yang berbeda dilarang oleh hukum Anti Monopoli. Sebab, jika *cost* yang dikeluarkan oleh penjual untuk satu konsumen dengan konsumen lainnya berbeda, maka harga secara logis tentu akan berbeda-beda pula. Oleh karena itu, secara teknis diskriminasi harga baru layak dilarang oleh hukum Anti Monopoli, manakala perbedaan terhadap konsumen yang satu dengan konsumen lainnya pada prinsipnya tidak merupakan refleksi dari perbedaan harga dasar (*marginal cost*) yang dikeluarkan oleh pihak penjual.¹⁰

Perjanjian penetapan harga selanjutnya yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli sebagaimana diatur pada Pasal 7 bahwa :

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014) cet.2, hlm. 151

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

3) Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Atau Alokasi Pasar (*Market Division*)

Perjanjian yang menimbulkan persaingan tidak sehat tidak hanya muncul karena adanya perjanjian untuk mengontrol harga. Namun, dengan adanya perjanjian pembagian wilayah persaingan usaha secara tidak sehat juga bisa muncul. Alasan timbulnya larangan perjanjian ini adalah bentuk upaya agar tidak terjadi kasus kartel secara khusus di daerah tertentu. Pembagian wilayah pasar bertujuan untuk menghindari adanya persaingan di antara pelaku usaha yang saling bersaing, sehingga pelaku usaha menaikkan dan mendapatkan keuntungan besar.

Dalam hal pembagian wilayah ini dapat dilihat dalam beberapa modus operandi, yakni:¹¹

1. Para pelaku usaha sepakat untuk mengharuskan pembelinya hanya menjual barang atau jasa tersebut hanya di wilayah tertentu saja;
2. Pelaku usaha menyepakati untuk menawarkan harga yang lebih tinggi dari mitranya di wilayah yang telah mereka sepakati bersama;
3. Adanya kesepakatan untuk hanya memasok kuantitas atau kualitas barang tertentu di pasar yang disepakati;

¹¹Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm.

4. Kesepakatan untuk tidak melakukan penjualan agresif atau mengiklankan produk di pasar mitranya sesuai dengan kesepakatan.

Dalam prakteknya, pelaku usaha melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk membagi wilayah pemasaran, sehingga satu pelaku usaha dapat menguasai pemasaran yang menjadi bagiannya tanpa adanya persaingan. Aturan mengenai perjanjian ini terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Perjanjian yang demikian ini hanya dilarang apabila perjanjian yang dibuat dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

4) Perjanjian Pemboikotan

Boikot merupakan suatu tindakan penolakan untuk bekerja sama. Dalam hal ini perjanjian pemboikotan dibuat dengan tujuan pengusiran atau terhadap pelaku usaha lain dari pasar yang sama. Selain itu perjanjian pemboikotan juga dilakukan oleh antara pelaku usaha untuk mencegah masuknya pelaku usaha lain yang memiliki potensi besar untuk bersaing. Perjanjian pemboikotan ini berdampak bagi pelaku usaha yang diboikot yaitu suatu kerugian usaha.

Sehubungan dengan perjanjian pemboikotan, ada dua macam perjanjian yang dilarang oleh Pasal 10, yaitu:¹²

1. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain (pihak ketiga) untuk melakukan usaha yang sama
2. Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain (pihak ketiga), jika:
 - a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain;

¹²Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014) cet.2, hlm. 175

- b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar yang bersangkutan.

Peraturan mengenai perjanjian pemboikotan ini dirumuskan secara *per se illegal*, sehingga perbuatan ini dapat diadili dan dijatuhi sanksi hukuman tanpa memperhatikan akibat dari perbuatan tersebut.

5) Perjanjian Kartel

Kartel merupakan persekongkolan atau persekutuan diantara produsen yang memproduksi produk sejenis dengan tujuan untuk mengatur produksi, penjualan, harga, serta untuk melakukan monopoli. Secara luas definisi kartel adalah suatu perjanjian antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran, mengalokasikan pelanggan, serta melakukan penetapan harga. Dalam praktiknya kartel bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi. Kegiatan kartel ini menimbulkan dampak yang merugikan, yaitu adanya praktek monopoli. Selain itu dampak selanjutnya adalah kerugian yang dialami konsumen karena kehilangan kesempatan untuk memilih harga, kualitas, serta pelayanan dari pelaku usaha.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perjanjian antara pesaing-pesaing untuk memengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa. Larangan ini hanya berlaku apabila perjanjian kartel tersebut dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Berarti, pendekatan yang digunakan dalam kartel adalah *rule of reason*. Kata-kata “mengatur produksi dan/atau pemasaran” yang bertujuan memengaruhi harga adalah menunjukkan upaya untuk meniadakan

kesempatan pihak lawan dalam pasar untuk memilih secara bebas di antara penawaran anggota kartel.¹³

6) Perjanjian *Trust*

Trust dalam rumusan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah bentuk kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar tetapi tetap menjaga kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang memiliki tujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa.

Unsur-unsur *trust* yaitu adanya suatu perjanjian, perjanjian tersebut dibuat bersama pelaku usaha lain, dari perjanjian tersebut dibentuk kerja sama dengan membentuk perusahaan yang lebih besar, perusahaan anggota yang tetap ada, bertujuan untuk mengontrol produksi, dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

7) Perjanjian Oligopsoni

Pada pasar oligopoli, perusahaan atau produsen hanya beberapa dengan pembeli yang relatife banyak, sebaliknya dalam pasar oligopsoni, pembeli hanya sedikit dengan penjual yang relatif banyak. Aturan mengenai perjannjian oligopsoni terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian ini dilarang apabila:

1. Perjanjian dilakukan secara bersama-sama;
2. Mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa;

¹³Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 106

3. Menguasai pembelian dan atau penerimaan pasokan atas suatu barang atau jasa;
4. Menguasai lebih dari 75% pangsa pasar pada satu jenis barang atau jasa tertentu;
5. Menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

Perjanjian Oligopsoni tidak dilarang, kecuali jika menimbulkan monopolisasi serta kerugian pada masyarakat. Hal ini karena rumusan Pasal 13 dirumuskan secara *rule of reason*.

8) Perjanjian Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal merupakan bagian dari hambatan vertikal. Hambatan vertikal merupakan segala praktik yang tujuannya untuk mencapai kondisi di mana kondisi ini dapat membatasi persaingan dalam dimensi vertikal atau dalam jenjang produksi atau dalam usaha yang memiliki keterkaitan sebagai rangkaian produksi atau rangkaian usaha.

Integrasi vertikal adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.¹⁴

Integrasi vertikal diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana bunyi selengkapnya sebagai berikut.

¹⁴Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014) cet.2, hlm. 205

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu di mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat”.

Dalam prakteknya sesungguhnya integrasi vertikal ini membawa beberapa manfaat, maka dari itu pendekatan atas Pasal 14 tersebut adalah menggunakan pendekatan *rule of reason*.

9) Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup adalah perjanjian yang mengondisikan bahwa pemasok dari suatu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli tidak akan membeli produk pesaingnya atau untuk memastikan bahwa seluruh produk tidak akan tersalur kepada pihak lain. Seorang pembeli (biasanya distributor) memasok produk tidak akan dijual atau memasok setiap produknya kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu.¹⁵

Perjanjian tertutup dilarang oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau tempat tertentu
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu

¹⁵Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm.

harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok

(3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

- a. Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau
- b. Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

10) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Perjanjian ini diatur dalam pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Bentuk perjanjian yang dimaksud adalah segala bentuk perjanjian yang telah disebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya, sepanjang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

b) Kegiatan yang dilarang

Berbeda dengan istilah “perjanjian” yang dipergunakan, dalam Undang-Undang, tidak dapat kita temukan suatu definisi mengenai “kegiatan”. Namun demikian jika tafsirkan secara “*a’contratio*” terhadap definisi perjanjian yang diberikan dalam undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan “kegiatan” tersebut adalah tindakan atau perbuatan hukum “sepihak” yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha

tanpa adanya keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha atau kelompok usaha lainnya.¹⁶

Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 kegiatan yang dilarang, secara jelas diatur bab IV yang terdiri dari 8 pasal, Pasal 17 sampai dengan Pasal 24. Di antaranya:

1) Monopoli

Monopoli dan Praktek monopoli merupakan hal berbeda. Singkatnya, Monopoli merupakan penguasaan atas produksi oleh pelaku usaha. Dengan demikian, monopoli adalah suatu keadaan di mana hanya ada satu pelaku usaha yang menguasai pasar untuk menawarkan produk kepada pembeli yang mengakibatkan pelaku usaha tersebut dapat mengontrol produksi, harga, pelayanan, serta wilayah pemasarannya. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 praktik monopoli diartikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Definisi tentang praktek monopoli ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *rule of reason* artinya sepanjang monopoli tidak menghambat persaingan usaha sehat dan tidak merugikan kepentingan umum, maka berdasarkan Undang-Undang hal ini tidak dilarang.

Hal-hal sangat penting yang harus diperhatikan dalam menentukan adanya praktik monopoli adalah analisis mengenai pasar bersangkutan, penilaian terhadap

¹⁶Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002) cet. 2 hlm. 31

keadaan pasar dan jumlah pelaku usaha, serta kehendak pelaku usaha untuk melakukan monopoli. Unsur-unsur yang dilarang pada Pasal 17 dalam monopoli adalah:

1. Adanya kegiatan penguasaan atas produksi barang dan/atau jasa;
2. Adanya kegiatan penguasaan atas pemasaran priksi barang dan/atau jasa;
3. Penguasaan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli;
4. Penguasaan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Yaitu penguasaan apabila pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar terhadap satu jenis barang dan/atau jasa tertentu.

2) Monopsoni

Monopsoni adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai panga pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal; sementara itu, pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Akibatnya, pembeli tunggal tersebut dapat mengontrol dan menentukan, bahkan mengendalikan, tingkat harga yang diinginkannya.¹⁷

Aturan mengenai kegiatan monopsoni tercantum pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Pasal ini dapat disimpulkan bahwa syarat adanya kegiatan monopsoni, yaitu:

1. Dilakukan oleh satu pelaku usaha yang merupakan pembeli tunggal;
2. Menguasai lebih dari 50% pangsa pasar;
3. Mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

¹⁷Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014) cet.2, hlm. 244

3) Kegiatan Jual Rugi (*Predatory Pricing*)

Dalam hukum persaingan usaha terdapat isu yang dianggap sebagai upaya untuk melakukan kecurangan dalam persaingan usaha yaitu adanya praktek jual rugi (*predatory price*). Dalam hal ini pelaku usaha menjual produk dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan dengan produk sejenis yang merupakan pesaingnya dengan maksud untuk memaksa pesaingnya keluar dari pasar tersebut.¹⁸

Istilah yang dikenal terkait penetapan harga di bawah pasar yaitu *predatory pricing* merupakan suatu kegiatan jual rugi dengan tujuan untuk mematikan pelaku usaha pesaingnya. Dalam praktiknya bentuk kegiatan jual rugi ini menghambat pelaku usaha lainnya untuk bersaing di pasaran. Pelaku usaha yang melakukan *predatory pricing* ini memasang harga yang tidak sehat untuk merebut pasar. Namun tak bisa dipungkiri bahwa hal ini menguntungkan konsumen tetapi hanya dapat dinikmati dalam jangka waktu yang pendek. Karena, apabila pelaku usaha yang melakukan *predatory pricing* telah kehilangan pesaing, maka pelaku usaha tersebut akan menaikkan harga produk yang pelaku usaha tersebut jual.

Menurut R. Shyam Khemani dalam *A Framework For Design and Implementation of Competition Law And Policy*, yang diterbitkan oleh World Bank dan OECD, sebenarnya *predatory pricing* biasanya dilarang bukan dikarenakan menetapkan harga yang terlalu rendah terhadap produk yang

¹⁸ Andi Syafriani, "Perlindungan Konsumen dalam Persaingan Usaha Industri Jasa Penerbangan", *Jurisprudentie*, Vol 3, No. 1 (2016), hlm. 6. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3618/3315> (Diakses 1 Januari 2019)

dijualnya sekarang, melainkan dikarenakan di masa yang akan datang pelaku usaha akan berusaha untuk mengurangi produksinya dan menaikkan harga.¹⁹

Selanjutnya, pada Pasal 8 ditegaskan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal di atas melarang pelaku usaha sebagai *supplier* melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain (distributor) untuk menetapkan harga vertikal, dimana distributor tidak boleh menjual produk yang diterima dari *supplier* dengan memasang harga yang lebih rendah dari harga yang telah disepakati antara *supplier* dengan distributor, karena dampak yang timbul dari perbuatan tersebut adalah adanya persaingan usaha tidak sehat. Namun, rumusan pasal ini diberlakukan secara *rule of reason*. Artinya, selama perjanjian yang dibuat tersebut tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat dua jenis penetapan harga jual kembali yaitu penetapan harga maksimum (*maximum price fixing*) dengan tujuan untuk mengontrol distributor agar tidak menjual di atas harga maksimum yang ditawarkan. Kemudian, penetapan harga secara minimum (*minimum price fixing*) dalam prakteknya para pelaku usaha melakukan kesepakatan dimana pembeli akan menjual kembali produk yang dibeli dengan harga yang tidak boleh di bawah harga yang telah disepakati. Tujuan kegiatan ini

¹⁹Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014) cet.2, hlm. 153

biasanya adalah untuk menjaga nama baik produsen merk tertentu dan juga mencegah persaingan usaha tidak sehat di kelas distributor.

4) Penguasaan Pasar.

Pasar dalam Pasal 1 angka 9 UU No 5 Tahun 1999 diartikan sebagai lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.

Larangan penguasaan pasar diatur pada Pasal 19, 20, dan 21 di mana pada prakteknya penguasaan pasar dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Tidak bisa dipungkiri, bahwa penguasaan pasar merupakan hal diingankan oleh pelaku usaha karena tingkat keuntungan yang bisa didapatkan. Penguasaan pasar dilakukan hanya oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dan *market power* hal ini ditentukan oleh penguasaan pangsa pasar yang lebih dari 50% oleh satu pelaku usaha.

5) Persekongkolan

Persekongkolan atau konspirasi usaha merupakan kerja sama dagang antara pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan 24 UU No 5 Tahun 1999.

c) Posisi Dominan

Posisi dominan merupakan keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan

keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha disingkat KPPU merupakan lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 75 tahun 1999 tentang KPPU dan diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2008 untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha.

Tugas KPPU diatur secara rinci pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, meliputi:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang antimonopoli ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, KPPU memiliki sejumlah kewenangan, sebagaimana dikemukakan secara rinci pada ketentuan pasal 36 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. KPPU tidak hanya berwenang menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha curang, tetapi proaktif berwenang untuk melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan, menyimpulkan hasilnya, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti serta menilai dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi tindakan administratif.²⁰

Kewenangan KPPU diatur secara rinci pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, meliputi:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

²⁰Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 27

- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan f pasal ini, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar;
- i. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

2. Mekanisme Penanganan Perkara

Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah mengatur tentang bagaimana tata cara penanganan perkara persaingan usaha yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010. KPPU melakukan penanganan terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha yaitu berdasarkan inisiatif komisi apabila terdapat dugaan pelanggaran tanpa ada laporan dari masyarakat, laporan oleh pelapor, serta laporan oleh pelapor dengan permintaan ganti rugi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha Nomor 1 Tahun 2010 tahapan-tahapan penanganan perkara adalah sebagai berikut:

a) Penanganan perkara berdasarkan laporan

1) Laporan

Mengenai ketentuan penyampaian laporan dugaan pelanggaran, diatur pada pasal 11 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2010. Dugaan pelanggaran dapat dilaporkan oleh setiap orang yang mengetahui bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran persaingan usaha kepada KPPU. Dimana laporan ditujukan kepada ketua KPPU tidak hanya langsung kepada kantor KPPU tetapi juga dapat ditujukan pada kantor perwakilan KPPU di daerah yang bersangkutan, secara tertulis dengan memuat:

1. Identitas pelapor, terlapor, dan saksi;
2. Penjelasan mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yang jelas;
3. Alat bukti dugaan pelanggaran;

4. Salinan identitas diri pelapor
5. Menandatangani laporan.

Dalam laporan dugaan pelanggaran, identitas pelapor akan dirahasiakan oleh KPPU sesuai dengan pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 11 ayat 6 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010. Dengan konsikkuensi bahwa laporan yang disampaikan kepada KPPU tidak dapat dicabut kembali oleh KPPU.

2) Klarifikasi

Tahap klarifikasi merupakan tahap di mana KPPU melakukan kegiatan untuk mendapatkan bukti awal dari perkara laporan. Dalam tahap ini KPPU memeriksa kelengkapan, memeriksa kebenaran, kesesuaian dugaan pelanggaran dengan pasal yang dilanggar serta alat bukti yang terdaftar, dan melakukan penilaian kompetensi absolut terhadap laporan yang disampaikan. Kemudian hasil klarifikasi tersebut akan memuat:

1. Apakah laporan merupakan kompetensi absolut KPPU;
2. Apakah laporan lengkap secara administrasi;
3. Kesesuaian dugaan pelanggaran dengan pasal yang dilanggar;
4. Menghentikan proses penanganan laporan apabila tidak memenuhi ketentuan administrasi, atau merekomendasikan kepada atasannya untuk dilakukan penyelidikan.

Pasal 14 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 memuat jangka waktu klarifikasi laporan perkara. Laporan perkara yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka unit

kerja yang menangani laporan akan memberitahukan dan mengembalikan laporan tersebut kepada pelapor paling lama sepuluh hari kerja sejak diterimanya laporan. Kemudian pelapor diberi waktu untuk melengkapi selama sepuluh hari sejak laporan dikembalikan. Apabila pelapor tidak melengkapi laporan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan, maka pelapor mengajukan laporan baru apabila menemukan bukti baru yang lengkap.

3) Penyelidikan

Tata cara penyelidikan, surat panggilan, dan hasil penyelidikan perkara persaingan usaha diatur pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010. Pegawai sekretariat KPPU yang ditunjuk oleh KPPU bertindak sebagai investigator akan melakukan penyelidikan terhadap hasil klarifikasi, laporan hasil kajian, laporan hasil penelitian, serta laporan hasil pengawasan. Langkah-langkah yang selanjutnya dilakukan oleh investigator adalah:

1. Memanggil serta meminta keterangan pelapor, terlapor, pelaku usaha, dan pihak lain yang terkait;
2. Memanggil serta meminta keterangan saksi;
3. Meminta pendapat ahli;
4. Mendapatkan surat atau dokumen;
5. Melakukan pemeriksaan setempat;
6. Melakukan analisa terhadap keterangan-keterangan, surat atau dokumen serta hasil pemeriksaan setempat.

Jangka waktu untuk melakukan penyelidikan adalah paling lama enam puluh hari sejak dimulainya penyelidikan.

4) Pemberkasan

Pemberkasan dilakukan dilakukan untuk menilai kelayakan laporan hasil penyelidikan untuk selanjutnya dilakukan gelar perkara. Apabila dianggap belum layak untuk dilakukan gelar perkara, maka akan dikembalikan kepada unit kerja yang menangani investigasi.

5) Sidang majelis komisi

Sidang majelis Komisi bersifat terbuka untuk umum hal ini diatur pada pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010. Namun, apabila pelapor dan terlapor mengusulkan untuk dilakukan secara tertutup dengan alasan adanya rahasia perusahaan, maka hal ini dibenarkan sesuai pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010. Pasal 43 ayat (3) menyatakan sidang majelis Komisi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam dua tahap yaitu, pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, majelis komisi menyampaikan kesimpulan tentang perlu atau tidak laporan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan. Dalam pemeriksaan pendahuluan, majelis Komisi akan menyusun laporan hasil pemeriksaan pendahuluan yang memuat;

1. Dugaan pelanggaran;
2. Tanggapan terlapor terhadap dugaan pelanggaran;

3. Nama saksi, nama ahli, serta surat atau dokumen yang diajukan oleh investigator dan terlapor;
4. Rekomendasi untuk pemeriksaan lanjutan.

Laporan tersebut kemudian disampaikan pada rapat komisi kemudian akan diputuskan apakah akan lanjut ke pemeriksaan lanjutan. Jangka waktu yang diberikan pada pemeriksaan pendahuluan diatur pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yaitu selama 30 hari sejak dilakukan pemeriksaan pendahuluan dimulai.

Pada tahap pemeriksaan lanjutan, jangka waktu yang diberikan tidak sama dengan jangka waktu yang diberikan pada pemeriksaan pendahuluan, jangka waktu yang diberikan pada pemeriksaan lanjutan yaitu 60 hari sejak pemeriksaan lanjutan dimulai. Apabila diperlukan, pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang selama 30 hari. Pada tahap ini Majelis sudah harus melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan sebagai dasar dugaan pelanggaran.

6) Putusan komisi

Setelah semua tahap dilalui, KPPU kemudian akan melakukan musyawarah Majelis Komisi yang beranggotakan minimal 3 orang KPPU dalam rangka pengambilan putusan Komisi untuk dilakukan penilaian, analisis, kesimpulan, serta putusan terhadap perkara persaingan usaha berdasarkan alat bukti yang cukup di mana hasil musyawarah tersebut berupa putusan Komisi. Mengenai ketentuan cara pengambilan keputusan, diatur pada pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, dan pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999.

b) Penanganan perkara berdasarkan inisiatif

1) Kajian

Pada tahap ini, KPPU memilih dan menetapkan daftar industry yang akan dikaji berdasarkan usulan dari unit kerja yang menangani kajian. Kajian sektor industry dilakukan oleh tim kajian yang ditetapkan oleh ketua KPPU. Dalam hal ini, kajian sektor industri meliputi kegiatan paling sedikit adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi engan tahapan:
 1. Melakukan studi literature;
 2. Mengundang pemangku kepentingan
 3. Melakukan penelitian lapangan
 4. Melakukan *focus group discussion* (FGD)
- b. Melakukan pengolahan data dan informasi yang diperoleh
- c. Melakukan analisa industry dan kebijakan
- d. Mengidentifikasi potensi dan dugaan pelanggaran Undang-Undang nomor 5 tahun 1999
- e. Menyusun hasil kajian.

2) Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan monitoring pelaku usaha oleh unit kerja untuk mendapatkan bukti awal dalam perkara inisiatif. Kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan data dari pelaku usaha, pemerintah, atau pihak lain, melakukan survei di pasar dan setempat, serta melakukan penerimaan surat tembusan dan atau informasi yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran. laporan hasil penelitian kemudian disampaikan dalam rapat komisi.

3) Pengawasan pelaku usaha

Pelaku usaha melakukan pengawasan dilakukan KPPU adalah control harga dan pasokan, wawancara kepada pelaku usaha, laporan berkala, mencari informasi dari pelaku usaha pesaing, serta meminta dari pemerintah.

4) Penyelidikan

Tata cara penyelidikan, surat panggilan, dan hasil penyelidikan perkara persaingan usaha diatur pada pasal 29 samapi dengan pasal 38 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010. Pegawai sekretariat KPPU yang ditunjuk oleh KPPU bertindak sebagai investigator akan melakukan penyelidikan terhadap hasil klarifikasi, laporan hasil kajian, laporan hasil penelitian, serta laporan hasil pengawasan. Langkah-langkah yang selanjutnya dilakukan oleh investigator adalah:

1. Memanggil serta meminta keterangan pelapor, terlapor, pelaku usaha, dan pihak lain yang terkait;
2. Memanggil serta meminta keterangan saksi;
3. Meminta pendapat ahli;
4. Mendapatkan surat atau dokumen;
5. Melakukan pemeriksaan setempat;
6. Melakukan analisa terhadap keterangan-keterangan, surat atau dokumen serta hasil pemeriksaan setempat.

Jangka waktu untuk melakukan penyelidikan adalah paling lama enam puluh hari sejak dimulainya penyelidikan.

5) Pemberkasan

Pemberkasan dilakukan untuk menilai kelayakan laporan hasil penyelidikan untuk selanjutnya dilakukan gelar perkara. Apabila dianggap belum layak untuk dilakukan gelar perkara, maka akan dikembalikan kepada unit kerja yang menangani investigasi.

6) Sidang majelis komisi

Sidang majelis Komisi bersifat terbuka untuk umum hal ini diatur pada pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010. Namun, apabila pelapor dan terlapor mengusulkan untuk dilakukan secara tertutup dengan alasan adanya rahasia perusahaan, maka hal ini dibenarkan sesuai pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010. Pasal 43 ayat (3) menyatakan sidang majelis Komisi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam dua tahap yaitu, pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, majelis komisi menyampaikan kesimpulan tentang perlu atau tidak laporan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan. Dalam pemeriksaan pendahuluan, majelis Komisi akan menyusun laporan hasil pemeriksaan pendahuluan yang memuat;

5. Dugaan pelanggaran;
6. Tanggapan terlapor terhadap dugaan pelanggaran;
7. Nama saksi, nama ahli, serta surat atau dokumen yang diajukan oleh investigator dan terlapor;
8. Rekomendasi untuk pemeriksaan lanjutan.

Laporan tersebut kemudian disampaikan pada rapat komisi kemudian akan diputuskan apakah akan lanjut ke pemeriksaan lanjutan. Jangka waktu yang diberikan pada pemeriksaan pendahuluan diatur pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yaitu selama 30 hari sejak dilakukan pemeriksaan pendahuluan dimulai.

Pada tahap pemeriksaan lanjutan, jangka waktu yang diberikan tidak sama dengan jangka waktu yang diberikan pada pemeriksaan pendahuluan, jangka waktu yang diberikan pada pemeriksaan lanjutan yaitu 60 hari sejak pemeriksaan lanjutan dimulai. Apabila diperlukan, pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang selama 30 hari. Pada tahap ini Majelis sudah harus melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan sebagai dasar dugaan pelanggaran.

7) Putusan komisi

Setelah semua tahap dilalui, KPPU kemudian akan melakukan musyawarah majelis Komisi yang beranggotakan minimal 3 orang KPPU dalam rangka pengambilan putusan Komisi untuk dilakukan penilaian, analisis, kesimpulan, serta putusan terhadap perkara persaingan usaha berdasarkan alat bukti yang cukup di mana hasil musyawarah tersebut berupa putusan Komisi. Mengenai ketentuan cara pengambilan keputusan, diatur pada pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, dan pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999.

Sumber Perkar	Penyelidikan	Pemberkasan	Pemeriksaan	Upaya Hukum
<p>LAPORAN</p> <p>Buku Daftar Penghantaran Laporan</p> <p>Berhenti</p> <p>Perbaikan Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Pemeriksaan</p> <p>Laporan dengan permintaan ganti rugi</p> <p>INISIATIF</p> <p>Industri yang menguasai hampir hidup orang banyak</p> <p>Industri strategi yang penting bagi negara</p> <p>Industri dengan tingkat konsentrasi tinggi</p> <p>Industri kegiatan nasional ataupun daerah</p> <p>Kajian Nasional</p> <p>Saran & Pertimbangan</p> <p>Paragraf & Legislatif</p> <p>Kajian</p> <p>Berita Media</p> <p>Hasil Pengawasan</p> <p>Laporan tidak lengkap</p> <p>Dengar Pendapat</p> <p>Temuan Pemeriksaan</p> <p>Sumber lain yang dapat di pertanggung jawabkan</p> <p>Pemeriksaan</p> <p>Pengawasan</p> <p>Buku Dalam Daftar Pengawasan</p> <p>Berhenti</p>	<p>Penyelidikan</p> <p>Berhenti</p> <p>Daftar Penghantaran Penyelidikan</p>	<p>Pemberkasan</p> <p>Gelar Laporan</p>	<p>PP</p> <p>PL</p> <p>Putusan</p> <p>Monitoring Putusan</p>	<p>P3</p> <p>Putusan lanjut</p> <p>MA</p> <p>Monitoring Putusan</p>

C. Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU

Setelah keluarnya putusan Komisi oleh KPPU yang berisi tentang telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 dan telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka salinan putusan tersebut kemudian diberikan kepada pelaku usaha. salinan tersebut kemudian akan dibaca secara layak pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisi dalam melaksanakan putusan. Apabila pelaku usaha telah menerima salinan putusan oleh KPPU, pelaku usaha memiliki hak untuk menerima atau tidak menerima dalam hal ini menolak putusan tersebut. Apabila pelaku usaha menolak putusan oleh KPPU, maka pelaku usaha dapat melakukan upaya hukum

yaitu pengajuan keberatan di Pengadilan Negeri. Pada pasal 44 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 dijelaskan bahwa “Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”.

Namun pada prosedurnya, pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tidak secara detail menjelaskan apakah keberatan diajukan melalui gugatan sengketa atau gugatan permohonan seperti pada hukum acara perdata. Tetapi, secara teoritis terdapat sejumlah alasan untuk mengatakan bahwa upaya hukum keberatan atas putusan KPPU dapat dikategorikan bersifat gugatan sengketa, karena:²¹

1. Kata “keberatan”, secara gramatikal sudah mengandung adanya sengketa atau perbedaan pendapat;
2. Produk hukum Pengadilan Negeri adalah “putusan”, bukan penetapan terhadap keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha;
3. Pihak yang berkeberatan dengan putusan Pengadilan Negeri dapat lagi mengajukan keberatan berupa kasasi kepada Mahkamah Agung.

Tata cara pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU mengacu pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 juga pada pasal 5 peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005. Pemeriksaan keberatan tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim yang sebisa mungkin ahli dalam bidang persaingan usaha tanpa melalui proses mediasi. Jangka waktu yang diberikan kepada Majelis Hakim

²¹Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 186

untuk memberikan putusan adalah 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan.

2. Upaya Hukum Kasasi

Jika belum ditemukan titik terang pada upaya hukum keberatan, maka diberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengajukan perkaranya pada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir. Tata cara pengajuan permohonan kasasi berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dalam melaksanakan putusan, dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan dasar tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, serta lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* yaitu metode penelitian dengan mengkaji berbagai literatur dan sumber sekunder lainnya yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas, utamanya putusan KPPU, putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Mahkamah Agung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPPU Makassar, khususnya pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta Pengadilan Negeri Makassar. Penentuan lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan, yaitu bahwa putusan perkara yang akan dikaji oleh penulis dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan usaha dan Pengadilan Negeri Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum yaitu dengan mengkaji tentang teori mengenai proses terjadinya hukum, proses bekerjanya hukum, serta akibat yang timbul di masyarakat. Selain itu, pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan per Undang-Undangan yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang diangkat, serta pendekatan kasus dengan mengkaji kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari KPPU dan Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber kedua (*secunder*) yang terdiri dari:
 - a. Sumber sekunder yang paling diutamakan (primer) yaitu peraturan perundang-undangan, putusan KPPU dan Pengadilan Negeri Makassar serta Mahkamah Agung.
 - b. Sumber sekunder yang diutamakan kedua (sekunder) yaitu literatur hukum yang sifatnya ilmiah dan relevan dengan permasalahan yang dibahas.
 - c. Tersier yaitu sumber sekunder yang diutamakan ketiga yaitu dari sumber yang bersifat melengkapi sumber sekunder yang paling diutamakan dan sumber utama kedua.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi yaitu keseluruhan dari kategori yang dijadikan sebagai objek penelitian yang terdiri dari seluruh putusan KPPU Makassar dari tahun 2002-2016, dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2002-2016, serta Putusan Mahkamah Agung dari tahun 2002-2016.
2. Sampel yaitu kategori-kategori yang dijadikan contoh yang dapat mewakili seluruh populasi atau seluruh kategori yaitu putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009, putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 01/Pdt.KPPU/2010/PN.Mks dan putusan Mahkamah Agung No. 141/K/Pdt.Sus/2011.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pencatatan secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
2. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen dan literatur yang relevan dengan masalah yang penulis teliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis yang digunakan penulis adalah dengan mengumpulkan data kemudian dianalisa secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata yang dituang pada penjelasan, uraian, gambaran permasalahan, serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Perkara yang Telah Diputuskan di KPPU

Sejak terbentuknya, KPPU telah menangani sejumlah perkara, baik yang melalui laporan masyarakat, maupun hasil penyelidikan atas inisiatif KPPU sendiri. Dalam kurun waktu tahun 2002 hingga 2016, KPPU pusat telah berhasil menangani sebanyak 348 perkara dari sebanyak 2.573 perkara yang masuk di KPPU. Tahun 2008 yang paling banyak menangani perkara yaitu sebanyak 68 perkara, dan yang terendah pada tahun 2002 yaitu hanya sekitar 8 perkara. Kemudian berturut-turut sejak 2011 sebanyak 13 perkara, 2012 sebanyak 9 perkara, 2013 sebanyak 12 perkara, 2014 sebanyak 19 perkara, 2015 sebanyak 22 perkara, dan 2016 sebanyak 24 perkara. Dari sebanyak 348 perkara yang berhasil diputuskan KPPU Pusat, sebanyak 144 perkara yang lanjut ke proses banding di Pengadilan Negeri. Sebanyak 60 perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan putusan membatalkan putusan KPPU dan 84 putusan Pengadilan Negeri yang menguatkan putusan KPPU. Kemudian dari 144 perkara yang berhasil diputus oleh Pengadilan Negeri, 127 perkara yang lanjut ke proses kasasi ke Mahkamah Agung.²²

Kemudian kondisi penanganan kasus pelanggaran hukum persaingan usaha pada level daerah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Daerah Makassar, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu

²²Sukarni, Anggota KPPU Pusat, *Penegakan hukum Persaingan Usaha Dalam Angka*, [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598c0069472ea/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598c0069472ea/penegakan-hukum-persaingan-usaha-dalam-rangka) penegakan-hukum-persaingan-usaha-dalam-rangka, (diakses 7 Mei 2019)

2002 hingga 2016 sebanyak 17 perkara dengan sebanyak 13 perkara dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan hanya 3 putusan yang menyatakan tidak terbukti.²³

Dari sebanyak 13 perkara yang berhasil diputuskan oleh KPPU Perwakilan Daerah Makassar, hanya 11 perkara yang lanjut ke proses banding ke Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan, 1 putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menguatkan putusan KPPU Makassar, dan 10 putusan membatalkan putusan KPPU Makassar. Kemudian, dari 11 perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Makassar, semuanya lanjut ke proses kasasi Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung telah berhasil memutus 10 perkara dengan 6 putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan KPPU Makassar dan 4 putusan menguatkan Pengadilan Negeri Makassar.²⁴

B. Dasar Hukum yang digunakan KPPU, Pengadilan Negeri Makassar, dan Mahkamah Agung

1. Putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009

a. Duduk Perkara

Bahwa sejak tahun 1969, taxi telah beroperasi secara liar di sekitar Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Agar tidak menjadi liar dan mudah dikontrol, maka pada tahun 1982, taxi-taxi tersebut dihimpun dalam suatu koperasi yang bernama Koperasi Angkutan Darat Maros (Kopadmas). Kemudian pada tahun 1995 nama Koperasi Angkutan Darat Maros (Kopadmas) berubah

²³Kantor KPPU Perwakilan Daerah Makassar, Observasi, 2019.

²⁴Kantor KPPU Perwakilan Daerah Makassar, Observasi, 2019.

nama menjadi Koperasi Taxi Bandara (Kopsidara) yang hingga saat ini digunakan sebagai nama koperasi angkutan darat tersebut.

Pembentukan Kopsidara bertujuan untuk menampung aspirasi pemilik taxi serta untuk mempermudah koordinasi dan penertiban taxi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Namun pada praktiknya, hanya taxi yang tergabung dalam Kopsidara yang diperbolehkan beroperasi dan mengambil penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Konsekuensinya, taxi Kopsidara tidak boleh mengambil penumpang di luar Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum sehingga taxi Kopsidara dapat beroperasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 194 Tahun 2003 tentang Izin Operasi Angkutan Taxi Kopsidara.

Pada tanggal 12 Februari 2008, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah di Makassar melakukan advokasi terhadap PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin untuk memberi kesempatan kepada operator angkutan darat selain Kopsidara untuk beroperasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sehingga pihak Bandara mengeluarkan Surat Nomor AP1.499/OP.90.2.5/2008/DU-B perihal Pembebasan Taxi Masuk Bandara. Adapun isi materi surat tersebut adalah bahwa PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menyetujui pelaksanaan pelayanan taxi di Bandara harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Realisasi Surat Pembebasan taxi masuk bandara tersebut, PT. Angkasa Pura I (persero) membuka kesempatan berusaha di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin terhadap 7 (tujuh) operator angkutan darat (taxi, sewa, da bus) yang sebelumnya pernah mengajukan permohonan kepada PT. Angkasa Pura I untuk berusaha di Bandara Internasional Sultan hasanuddin, yaitu: Perusda Maros, CV. Anugerah Karya, PT. Bandar Avia Mandiri, Primkopau Lanud Hasanuddin, PT. Bosowa Utama, PT. Putra Transport Nusantara, dan Perum Damri.

Sementara dalam tahun 2008, 5 (lima) operator angkutan darat yang juga telah memiliki izin operasi dari Provinsi Sulawesi Selatan tidak mendapat kesempatan berusaha di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, yaitu: PT. Lima Muda Nusantara, Puskud Hasanuddin, PT. Lima Muda Mitra, Gowata Taxi, dan Gowa Makassar Taxi.

Sehingga selain operator Kopsidara yang berkesempatan berusaha di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin tanpa pembatasan jumlah angkutannya yang terdiri atas 185 unit, juga khusus yang 7 (tujuh) operator angkutan darat saja yang mendapat kesempatan berusaha di Bandara Internasional Sultan hasanuddin atas izin managemen PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, itupun disertai persyaratan khusus, yaitu:

1. Setiap operator angkutan darat taxi dan sewa dibatasi hanya sebanyak masing-masing 10 unit angkutan tiap operator dengan keharusan membayar biaya operasional berupa biaya (sewa tempat loket, stiker, dan parkir berlangganan) per tahunnya sebesar kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta

lima ratus ribu rupiah) ditambah sekali buka pintu angkutan taxi dan sewa sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

2. Kemudian untuk Bus Damri dibatasi hanya 1 unit angkutan dan diharuskan membayar biaya satu kali rit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan pembatasan-pembatasan dan penetapan biaya operasional terhadap operator angkutan taxi, sewa, dan bus damri tersebut, sehingga PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin diduga melanggar Pasal 17 dan Pasal 19 huruf (a), (c), dan (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Pertimbangan Hukum Majelis Komisi KPPU

Bahwa karena Terlapor diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 dan Pasal 19 huruf (a), (c), dan (d) UU No. 5 Tahun 1999, maka hanya kedua Pasal tersebut juga yang dianalisis dan ditimbang oleh majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Daerah Makassar sebagaimana secara berurutan berikut.

- a. Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 yang selengkapnya berbunyi.
 - (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya pratik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;
 - (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan jasa yang sama; atau
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Untuk menyatakan Terlapor yaitu PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Cabang Makassar terbukti melakukan Pasal 17 UU No. 1999 tersebut, maka Majelis KPPU menimbang unsur-unsur Pasal 17 tersebut sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha²⁵

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT. Angkasa Pura I (persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sesuai dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 dan Terlapor merupakan perusahaan yang memiliki hak eksklusif untuk mengelola jasa pelayanan kebangsaan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Oleh karena itu, unsur **Pelaku Usaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 terpenuhi.

b. Penguasaan atas Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa.²⁶

Bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau

²⁵Putusan KPPU Perwakilan Daerah Makassar No. 18/KPPU-I/2009, h. 49-51.

²⁶Putusan KPPU Perwakilan Daerah Makassar No. 18/KPPU-I/2009, h. 50.

prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”.

Bahwa oleh karena jasa pelayanan taxi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar merupakan produk jasa yang diproduksi oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, maka unsur jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 UU No.15 Tahun 1999 terpenuhi dan oleh karenanya, unsur jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 terpenuhi.

c. Penguasaan atas Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa.²⁷

Bahwa Terlapor memiliki hak monopoli untuk mengelola Bandara Udara dan kegiatan penunjang lainnya sesuai peraturan yang berlaku sehingga Terlapor mengelola kegiatan penunjang bandara udara dalam bentuk jasa pelayanan angkutan taxi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Dengan demikian unsur penguasaan pasar atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa terpenuhi.

d. Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.²⁸

Bahwa Terlapor yaitu PT. Angkasa Pura I (Persro) Cabang bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar selaku pengelola jasa pelayanan taxi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menetapkan biaya operasional taxi bandara, seperti: biaya sewa loket tiket, biaya retribusi, biaya stiker bandara, dan biaya parkir berlangganan selama 1 (satu) tahun periode.

²⁷Putusan KPPU Perwakilan Daerah Makassar No. 18/KPPU-I/2009, h. 50-51.

²⁸ Putusan KPPU Perwakilan Daerah Makassar No. 18 KPPU-I/2009, h. 51.

Penetapan biaya-biaya tersebut Terlapor mendasarkan pada peraturan pentarifan yang berlaku di lingkungan PT. Angkasa Pura I dengan menggunakan tarif dasar (*floor price*) serta memberlakukan biaya operasional taxi secara seragam kepada pengguna jasa bandara lainnya, maka Majelis KPPU menyatakan Terlapor tidak melakukan praktik monopoli dalam menetapkan biaya operasional taxi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar secara berlebihan (*excessive price*) dan oleh karenanya, Terlapor dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 UU No. 5 tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Setelah Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 dipertimbangkan oleh KPPU, maka berikutnya dipertimbangkan Pasal 19 huruf (a), (c), dan huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999 untuk menyatakan apakah Terlapor Terbukti atau tidak melanggar Pasal 19 tersebut. Untuk itu, Majelis KPPU menimbang unsur-unsur Pasal 19 huruf (a), huruf (c), dan huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999 secara berurutan sebagai berikut.

b. Pasal 19 huruf (a) UU No.; 5 Tahun 1999 yang selengkapya berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, berupa:

a. Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan”.

a. Unsur Pelaku Usaha.²⁹

Bahwa oleh karena PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tergolong sebagai Pelaku Usaha

²⁹Putusan KPPU Perwakilan Daerah Makassar No. 18 KPPU-I/2009, h. 52.

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, maka dengan sendirinya Pasal 19 huruf (a), huruf (c) dan huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999 yang kesemuanya mensyaratkan unsur Pelaku Usaha, maka Majelis KPPU Perwakilan daerah Makassar menyatakan bahwa PT. Angkasa Pura I (Persero) selaku Pelaku Usaha dalam kasus ini dinyatakan memenuhi unsur Pasal 19 baik huruf (a) maupun huruf (c) dan huruf (d).

- b. Unsur Menolak dan/atau Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu Untuk Melakukan Kegiatan Usaha yang Sama Pada Pasar Bersangkutan.³⁰

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha tertentu adalah operator angkutan taxi yang memiliki izin operasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 8 (delapan) operator, yaitu: PT. Bosowa Utama, PT. Lima Muda Nusantara, Puskud Hasanuddin, PT. Lima Muda Mitra, Gowa Taxi, Kopsidara, Gowa Makassar Taxi, dan PT. Putra Transport Nusantara. Sedangkan 2 (dua) operator taxi lainnya yang belum memiliki izin operasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu: Primkopau lanud Hasanuddin dan CV. Anugerah Karya. Dengan demikian unsur Pelaku Usaha Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) UU No. 5 Tahun 1999 terpenuhi.

Kemudian unsur **Kegiatan Usaha Yang Sama** dan Unsur **Pasar Bersangkutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) UU No. 5 Tahun 1999 juga terpenuhi karena Jasa Pelayanan Angkutan taxi di Bandara Internasional Hasanuddin makassar merupakan lokasi kegiatan usaha yang sama oleh semua pelaku usaha dalam perkara ini. Kemudian, unsur Pasar bersangkutan

³⁰Putusan KPPU Perwakilan Daerah Makassar No. 18 KPPU-I/2009, h. 52-53.

juga terpenuhi karena pasar bersangkutan yang dimaksud dalam perkara ini adalah Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Dengan demikian tindakan Terlapor yang menolak dan/atau menghalangi operator taxi umum yang memiliki izin operasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat beroperasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yaitu: PT. Bosowa Utama, PT. Putra Transport Nusantara, Primkopau Lanud Hasanuddin, dan CV. Anugerah Karya, maka unsur menolak dan/atau menghalangi Pelaku Usaha Tertentu Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Yang Sama Pada Pasar Bersangkutan terpenuhi. Oleh karena itu, majelis KPPU Perwakilan Daerah Makassar menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (a) UU No. 5 Tahun 1999.

c. Pasal 19 huruf (c) UU No. 5 tahun 1999 yang selengkapnya berbunyi.

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, berupa:

c. Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan”.

a. Unsur Pelaku Usaha

Sebagaimana telah dikemukakan pada pertimbangan Majelis KPPU di atas bahwa PT. Angkasa Pura I (persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sebagai Terlapor dalam perkara ini memenuhi unsur sebagai Pelaku Usaha. Oleh karena itu, penulis tidak mengulangi pertimbangan KPPU di sini.

- b. Unsur Membatasi Peredaran dan/atau Penjualan Barang dan/atau Jasa Pada Pasar Bersangkutan.³¹

Bahwa pada unsur membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan ini, Majelis KPPU menganalisis dan menimbang secara berurutan tentang pengertian Barang dan/atau jasa, kemudian pengertian Pasar Bersangkutan sebagaimana dalam perkara ini sebagai berikut.

Bahwa Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam perkara ini adalah Jasa Pelayanan Taxi di bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 5 tahun 1999, sehingga dengan demikian Pasar Produk sebagaimana ditentukan sebagai salah satu unsur dalam Pasal 19 huruf (c) UU No. 5 Tahun 1999 oleh Majelis KPPU dinyatakan terpenuhi atau terbukti dilanggar oleh Terlapor.

Bahwa **Pasar Bersangkutan** sebagaimana dimaksud dalam perkara ini adalah Jasa Pelayanan angkutan Taxi yang dilaksanakan oleh operator taxi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999.

Bahwa tindakan Terlapor membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan yang sama dilakukan Terlapor dengan cara membatasi peredaran unit taxi operator taxi bandara, yaitu: PT. Bosowa Utama, PT. Putra Transport Nusantara, Primkopau Lanud Hasanuddin, dan CV. Anugerah Karya masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan pertimbangan *load factor* (faktor beban atau faktor muatan penumpang) dengan maksud untuk mengupayakan secara bertahap menyeimbangkan antara kebutuhan konsumen,

³¹Putusan KPPU Perwakilan Daerah Makassar No. 18 KPPU-I/2009, h. 53-55.

keberadaan taxi umum serta kemampuan dan kapasitas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sebagai tindakan Terlapor dalam kerangka pengaturan pengelolaan jasa taxi guna menjaga keseimbangan antara *supply* dan *demand* sehingga Majelis KPPU memutuskan dan menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (c) UU No. 5 Tahun 1999.

d. Pasal 19 huruf (d) UU No. 5 tahun 1999 yang selengkapnya berbunyi.

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dana/atau persaingan usaha tidak sehat, berupa:

d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”

a. Unsur Pelaku Usaha Tertentu

Pelaku Usaha Tertentu dimaksudkan dalam perkara ini adalah operator taxi di Bandara Internasional Hasanuddin Makassar yang tidak mendapat kesempatan berusaha di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang terdiri dari: PT. Bosowa Utama, PT. Putra Transport Nusantara, Primkopau Lanud Hasanuddin, dan CV. Anugerah Karya, sehingga dengan demikian Pelaku Usaha Tertentu yang dibatasi oleh Terlapor terbukti (terpenuhi) dilanggar oleh Terlapor.³²

b. Praktik Diskriminasi³³

Bahwa tindakan diskriminasi yang dilakukan Terlapor terhadap pelaku usaha tertentu seperti PT. Bosowa Utama, PT. Putra Transport Nusantara, Primkopau Lanud Hasanuddin, dan CV. Anugerah Karya dalam bentuk

³²Putusan KPPU Perwakilan Daerah Makassar No. 18 KPPU-I/2009, h. 55.

³³Putusan KPPU Perwakilan Daerah Makassar No. 18 KPPU-I/2009, h. 55-56.

membatasi keempat operator taxi hanya sebanyak masing-masing 10 unit kendaraan, sedangkan Kopisdara tidak dibatasi sama sekali sehingga bisa mengoperasikan seluruh unit kendaraannya sebanyak 185 unit. Dengan demikian unsur praktik melakukan diskriminasi terhadap pelaku Usaha Tertentu terbukti dilanggar oleh Terlapor natau dengan istilah Terpenuhi unsur ini.

Dengan demikian, Majelis KPPU Perwakilan Makassar menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

c. Diktum/Amar Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009

Setelah Majelis KPPU Perwakilan Makassar menimbang Pasal-Pasal UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monolpoli dan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diduga dilanggar oleh Terlapor yaitu PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sebagaimana dalam perkara tersebut, maka Majelis KPPU Perwakilan Makassar menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan PT. Angkasa Pura I (persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan PT. Angkasa Pura I (persro) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

3. Menyatakan PT. Angkasa Pura I (persro) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
4. Menyatakan PT. Angkasa Pura I (persro) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
5. Memerintahkan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasan uddin Makassar membuka kesempatan bagi operator taxi yang telah memiliki izin operasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan izin berusaha sebagai penyedia layanan jasa taxi di lingkungan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;-----
6. Menghukum PT. Angkasa Pura I (persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin makassar membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetor ke Kasa Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Sekretariaqt Jenderal Satuan Kerja Komkisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).³⁴

Setelah penulis mencermati duduk/posisi perkara, pertimbangan hukum Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Daerah Makassar dalam Putusannya Nomor 18/KPPU-I/2009 sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka menurut hemat penulis bahwa Majelis KPPU Perwakilan Daerah Makassar

³⁴Putusan KPPU Perwakilan Daerah Makassar No. 18 KPPU-I/2009, h. 57-58.

menjatuhkan vonis bersalah terhadap Terlapor yaitu PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar karena Majelis KPPU semata-mata mendasarkan putusannya pada kehendak Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) UU Nomor 5 Tahun 1999 tanpa mempertimbangkan fakta berupa keterbatasan kapasitas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang terbatas sebagai pasar pelayanan angkutan darat taxi, sewa, dan bus Damri, dimana Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) tidak memperdulikan terbatasnya kapasitas pasar pelayanan angkutan taxi untuk mengeluarkan kebijakan bagi Terlapor untuk mebatasi operator unit taxi lainnya dibandingkan dengan operator Kopsidara yang jumlah unit angkutannya tidak dibatasi oleh Terlapor.

Selain itu, Majelis Komisi juga memberikan pertimbangan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum yang pada intinya menyatakan bahwa semua operator angkutan wajib memiliki izin operasi dari Dinas Perhubungan.

2. *Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1/Pdt.KPPU/2010/PN.Mks*

a. *Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar*

Bahwa setelah memperhatikan pokok-pokok keberatan pemohon (PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Sultan Hasanuddin) yang dihubungkan dengan dalil-dalil sanggahan dari termohon. Bahwa keberatan pemohon pada pokoknya berisi:

1. Bahwa pemohon tidak pernah menolak atau menghalangi pelaku usaha taxi tertentu untuk melakukan kegiatan usaha di Bandara Internasional Sultan

Hasanuddin Makassar, justru pemohon mendorong pengusaha/operator taxi yang ada di sekitar wilayah pemohon untuk turut serta dalam kegiatan penunjang operasional Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan yang berwenang untuk menerbitkan izin operasi bagi operator taxi Bandara adalah Gubernur dalam hal ini dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan pemohon hanya mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Bandara.

2. Bahwa pemohon tidak pernah melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, karena penentuan kuota dan izin operasi bagi operator taxi bukan kewenangan pemohon melainkan kewenangan Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan izin operasi yang diberikan kepada operator taxi kopsidara hanya terbatas di wilayah Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang artinya Kopsidara hanya diperbolehkan mengangkut penumpang dari luar ke dalam Bandara.

Bahwa terhadap pokok keberatan pemohon keberatan tersebut, maka termohon keberatan memberi jawaban dengan tetap mempertahankan Putusan No. 18/KPPU-I/2009 dengan pokok jawaban bahwa pemohon keberatan telah bersalah melanggar pasal 19 huruf (a) dan Pasal 19 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999. Akan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan-keberatan pemohon keberatan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Komisi berkesimpulan bahwa unsur menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, karena terlapor (pemohon) menolak dan/atau menghalangi operator taxi umum yang memiliki izin operasi dari Dinas

Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat menyediakan jasa layanan taxi di Bandara Sultan Hasanuddin dilakukan dengan cara memberikan izin berusaha di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin hanya kepada 4 operator taxi baru selain Kopsidara yaitu PT. Bosowa utama, PT. Transport Nusantara, Primkopau Lanud dan CV Anugerah Karya;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Komisi tersebut pemohon telah membantah keras dengan menyatakan bahwa justru pemohon mendorong pengusaha/operator taxi yang ada disekitar wilayah pemohon untuk turut serta dalam kegiatan penunjang operasional bandara sebagaimana surat Direksi No. AP 1.852/OP.90.2.5/2008/DU.B tanggal 12 April 2008 surat pemohon No. AP 1.852/OP.90.2.5/2008 tanggal 4 April 2008;

Menimbang bahwa terhadap kesimpulan Majelis Komisi serta keberatan pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama keseluruhan isi putusan No. 18/KPPU-I/2009 serta bukti-bukti yang diajukan termohon diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya:³⁵

- Bahwa PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin (Pemohon) membuka kesempatan berusaha di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin kepada 8 (delapan) operator angkutan darat (taxi, sewa dan bus) yaitu Kopsidara, PT. Bosowa utama, PT. Putra Transport Nusantara, Perusda Maros, CV. Anugerah Karya, PT. Bandar Avia Mandiri,

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 01/Pdt.KPPU/2010/PN Mks, hlm. 82

Primkopau Lanud, dan Perum Damri yang telah memiliki izin operasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi selatan;

Menimbang, bahwa mengenai operator taxi PT. Lima Muda Nusantara, Puskud Hasanuddin, PT. Lima Muda Mitra, Gowa Taxi dan Gowa Makassar Taxi tidak menyediakan layanan taxi di Bandara bukan karena adanya penolakan atau dihalangi pemohon akan tetapi disebabkan karena masalah teknis pada internal perusahaan yang tidak setuju dengan adanya pembatasan jumlah unit taxi serta biaya operasioanl yang dianggap tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti bahwa pemohon menolak/menghalangi operator taxi umum yang memiliki izin operasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang tindak diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu sebagai berikut.³⁶

Menimbang, bahwa Mejelis Komisi berkesimpulan bahwa tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dilakukan terlapor (pemohon) dengan cara membatasi peredaran unit taxi, operator taxi PT. Bosowa Utama, PT. Putra Transport Nusantara, Primkopau Lanud Hasanuddin dan CV Anugerah Karya di batasi masing-masing 10 unit, sedangkan operator taxi kopsidara tetap dapat mengoperasikan 185 unit taxi yang udah ada;

Menimbang bahwa disisi lain Majelis Komisi menilai bahwa berkaitan dengan tindakan pembatasan tersebut mempertimbangkan;

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 01/Pdt.KPPU/2010/PN Mks, hlm. 83

- Bahwa latar belakang tindakan pembatasan tersebut adalah terkait dengan rekomendasi hasil kajian tim teknis dengan mempertimbangkan dengan load factor Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar
- Bahwa Majelis Komisi memahami tindakan pembatasan tersebut sebagai upaya pengaturan secara bertahap guna menyeimbangkan antara kebutuhan konsumen, keberadaan taxi umum serta kemampuan dan kapasitas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar
- Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan pembatasan tersebut sebagai tindakan dalam rangka pengaturan pengelolaan jasa taxi guna menjaga keseimbangan antara supply dan demand
- Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai tindakan pembatasan tersebut masih dapat dibenarkan untuk saat ini

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Komisi menyatakan bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan kesimpulan tim pemeriksa LHPL yang menyatakan perlakuan kebijakan pembagian kuota adalah bentuk perlakuan diskriminatif terlapor kepada operator angkutan taxi yang baru, Majelis Komisi menilai perlakuan diskriminatif terlapor kepada operator angkutan taxi yang baru, Majelis Komisi menilai perlakuan diskriminatif terlapor justru terjadi saat terlapor memberikan kesempatan berusaha di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin hanya kepada 3 dari 8 operator angkutan taxi yang sudah memiliki izin operasi dari Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan yaitu Kopsidara, PT. Bosowa Utama, PT. Putra Transport Nusantara sedangkan terhadap 5 operator lainnya yaitu PT. Lima Muda Nusantara, Puskud Hasanuddin, PT Lima Muda

Mitra, Gowa Taxi dan Gowa Makassar Taxi tidak diberikan, bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan kebijakan terlapor yang memberikan kesempatan berusaha di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin hanya kepada 3 dari 8 operator angkutan taxi yang sudah mendapat izin operasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai bentuk diskriminatif terlapor terhadap penyedia jasa layanan angkutan taxi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan dengan seksama pertimbangan dan kesimpulan Majelis Komisi sebagaimana di uraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Komisi tidak konsisten dan saling bertentangan antara satu dengan lainnya dan kesimpulan Majelis Komisi yang menyatakan terlapor (pemohon) memberikan kesempatan hanya kepada 3 dari 8 operator angkutan taxi yang sudah mendapat izin operasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan bertentangan dengan fakta yang diungkapkan oleh tim pemeriksa yang menyatakan bahwa PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Sultan Hasanuddin membuka kesempatan berusaha di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin kepada 8 operator angkutan darat (taxi, sewa, dan bus) yaitu Kopsidara, PT. Bosowa utama, PT. Putra Transport Nusantara, Perusda Maros, CV. Anugerah Karya, PT. Bandar Avia Mandiri, Primkopau Lanud, dan Perum Damri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti bahwa pemohon telah melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;

Menimbang, bahwa pemohon keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf (a) dan Pasal 19 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999, maka dengan demikian permohonan pemohon keberatan dapat dikabulkan;

b. Diktum/Amar Putusan No. 01/Pdt.KPPU/2010/PN. Mks

Setelah Majelis Hakim memperhatikan Pasal-Pasal Undang-Undang No.5 Tahun 1999 serta ketentuan hukum lainnya, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan pemohon keberatan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;
2. Menyatakan batal putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No.18/KPPU-I/2009 tanggal 8 Maret 2010;
3. Menyatakan pemohon keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (a) dan Pasal 19 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999
4. Membebankan kepada termohon keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)³⁷

Setelah penulis mengemukakan pertimbangan hukum dan diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana dalam putusannya No. 1/Pdt.KPPU/2010/PN. Mks, maka berikut ini penulis kemukakan bahwa Majelis Hakim mengacu pada kapasitas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang sangat terbatas untuk semua operator angkutan taxi. Melalui pertimbangan tersebut yang dijadikan dasar hukum oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin membatasi sebagian

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 01/Pdt.KPPU/2010/PN Mks, hlm. 85

operator angkutan dan membatasi unit angkutan sebagian operator untuk beroperasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar

Selain itu alasan Majelis Hakim membenarkan tindakan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin adalah dengan adanya bukti surat yang dikeluarkan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin No. AP.I.499/OP.90.2.5/2008/DU-B perihal pembebasan taksi masuk bandara.

Sehingga Pengadilan Negeri Makassar membenarkan perbuatan Terlapor sehingga dalam diktumnya menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf (a) dan (huruf (d) UU No. 5 tahun 1999.

3. *Putusan Mahkamah Agung No.141/K.Pdt.Sus/2011*

Sebelum penulis kemukakan apa yang menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bersalah kepada Terlapor yaitu PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar melanggar Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dalam Putusannya No. 141 K/Pdt.Sus/2011, maka penulis mengemukakan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dan Diktum Putusannya secara berurutan sebagai berikut.

a. Pertimbangan Hukum MA

Bahwa alasan kasasi dari pemohon kasasi dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* Pengadilan Negeri Makassar yang membatalkan putusan pemohon

kasasi/KPPU tidak tepat dan tidak benar karena salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaimana terurai berikut.³⁸

Bahwa 2 dari 7 operator yang mendapat izin operasi yaitu dari Primkopau dan CV Anugerah termohon kasasi ternyata belum mendapat izin beroperasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, padahal menurut ketentuan vide Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 76 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 35 Tahun 2003, bahwa angkutan taksi bandara dapat beroperasi bila telah mendapat izin operasi Dinas Perhubungan.

Bahwa disisi lain operator-operator taksi lainnya yaitu PT. Lima Muda Nusantara dan kawan-kawan yang telah memiliki izin operasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan justru tidak memperoleh izin jasa layanan taksi dari termohon kasasi sehingga terbukti adanya diskriminasi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin salah menerapkan kebijakan menghalangi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha, selain hanya beberapa operator taksi yang diizinkan sehingga menimbulkan diskriminasi dan monopoli (melanggar Pasal 19 huruf a dan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999).

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan membatalkan putusan pengadilan

³⁸Putusan Mahkamah Agung No. 141 K/Pdt.Sus/2011, h. 26-27.

Negeri Makassar No. 01/Pdt.KPPU/2010/PN.Mks tanggal 26 Juli 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

b. Amar/Diktum Putusan No.141/K.Pdt.Sus/2011

MENGADILI³⁹

Mengabulkan permohonan kasis dari pemohon kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 01/Pdt.KPPU/2010/PN.Mks tanggal 26 Juli 2010.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Noor 5 Tahun 1999;
3. Menyatakan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasioanl Sultan Hasanuddin Makassar tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Menyatakan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

³⁹Putusan Mahkamah Agung No. 141 K/Pdt.Sus/2011, h. 27.

5. Menghukum PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Sekretariat Jendral Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha).⁴⁰

Setelah penulis mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar/diktum putusan Mahkamah Agung sebagaimana dalam putusannya Nomor 141 K/Pdt.Sus/2011, maka penulis kemukakan bahwa dasar hukum yang dijadikan landasan bagi Mahkamah Agung menyatakan Terlapor terbukti bersalah melanggar Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena mendasarkan putusannya pada Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 76 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa taxi bandara dapat beroperasi di area pasar (termasuk di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar) bila telah mendapat izin operasi Dinas Perhubungan. Sementara PT. Angkasa Pura I (persero) tidak memberi kesempatan beroperasi di Bandara kepada Primkopau dan CV. Anugerah padahal kedua operator angkutan tersebut belum memiliki izin operasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

⁴⁰Putusan Mahkamah Agung No. 141 K/Pdt.Sus/2011, h. 27.

C. Perbedaan Pertimbangan Hukum Majelis Komisi KPPU dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri makassar dan Mahkamah Agung.

Setelah penulis mencermati duduk/posisi perkara, pertimbangan hukum Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Daerah Makassar dalam Putusannya Nomor 18/KPPU-I/2009 sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka menurut hemat penulis bahwa Majelis KPPU Perwakilan Daerah Makassar menjatuhkan vonis bersalah terhadap Terlapor yaitu PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar karena Majelis KPPU semata-mata mendasarkan putusannya pada kehendak Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) UU Nomor 5 Tahun 1999 tanpa mempertimbangkan fakta berupa keterbatasan kapasitas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang terbatas sebagai pasar pelayanan angkutan darat taxi, sewa, dan bus Damri, dimana Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) tidak memperdulikan terbatasnya kapasitas pasar pelayanan angkutan taxi untuk mengeluarkan kebijakan bagi Terlapor untuk membatasi operator unit taxi lainnya dibandingkan dengan operator Kopsidara yang jumlah unit angkutannya tidak dibatasi oleh Terlapor.

Selain itu, Majelis Komisi juga memberikan pertimbangan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum yang pada intinya menyatakan bahwa semua operator angkutan wajib memiliki izin operasi dari Dinas Perhubungan. Di mana dalam hal ini penulis sepakat terhadap putusan yang dikeluarkan oleh KPPU Makassar.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar penulis dalam hal ini tidak sependapat. Setelah penulis mengemukakan pertimbangan hukum dan diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana dalam putusannya No. 1/Pdt.KPPU/2010/PN. Mks, maka berikut ini penulis kemukakan bahwa Majelis Hakim mengacu pada kapasitas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang sangat terbatas untuk semua operator angkutan taxi. Melalui pertimbangan tersebut yang dijadikan dasar hukum oleh Terlapor membatasi sebagian operator angkutan dan membatasi unit angkutan sebagian operator untuk beroperasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Dimana tindakan tersebut merupakan tindakan dalam rangka pengaturan pengelolaan jasa taxi untuk menjaga keseimbangan antara *supply* dan *demand*.

Selain itu alasan Majelis Hakim membenarkan tindakan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin adalah dengan adanya bukti surat yang dikeluarkan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin No. AP.I.499/OP.90.2.5/2008/DU-B perihal pembebasan taksi masuk bandara.

Sehingga Pengadilan Negeri Makassar membenarkan perbuatan Terlapor sehingga dalam diktumnya menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) UU No. 5 tahun 1999.

Selanjutnya, setelah penulis mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar/diktum putusan Mahkamah Agung sebagaimana dalam putusannya Nomor 141 K/Pdt.Sus/2011, maka penulis kemukakan bahwa dasar hukum yang dijadikan landasan bagi Mahkamah Agung menyatakan Terlapor

terbukti bersalah melanggar Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena mendasarkan putusannya pada Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 76 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa taxi bandara dapat beroperasi di area pasar (termasuk di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar) bila telah mendapat izin operasi Dinas Perhubungan. Sementara PT. Angkasa Pura I (persero) tidak memberi kesempatan beroperasi di Bandara kepada Primkopau dan CV. Anugerah padahal kedua operator angkutan tersebut belum memiliki izin operasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum masing-masing lembaga peradilan tersebut yaitu Majelis Komisi KPPU, Pengadilan Negeri Makassar, dan Mahkamah Agung, maka selanjutnya penulis kemukakan perbedaan pertimbangan hukum ketiga lembaga peradilan tersebut, yaitu:

1. Pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU Perwakilan Daerah Makassar persis sama dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung yaitu bahwa Terlapor terbukti secara sah melanggar Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999 karena terbukti melakukan tindakan membatasi sebagian operator angkutan taxi dan membatasi unit angkutan operator taxi untuk beroperasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan Pengadilan Negeri Makassar sehingga menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999 adalah karena tindakan Terlapor membatasi

operator angkutan taxi adalah atas pertimbangan kapasitas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang terbatas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum yang digunakan Majelis Komisi KPPU dalam menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terlapor melanggar adalah semata-mata mendasarkan pada kehendak Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) UU No. 5 tahun 1999. Pada tingkat banding di Pengadilan Negeri Makassar Terlapor tidak terbukti bersalah atas dasar kehendak Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) kaitannya dengan kondisi pasar pelayanan angkutan darat (taxi) yang kapasitasnya terbatas bagi semua angkutan taxi jika tidak diadakan pembatas-pembatas unit angkutan taxi tertentu masuk di bandara. Kemudian, Dasar hukum yang dijadikan oleh Mahkamah Agung adalah Pasal 64 (1) jo Pasal 76 (1) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa operator taxi yang telah mendapat izin operasional dari Dinas Perhubungan tidak boleh dibatasi beroperasi di pasar pelayanan angkutan termasuk di bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

2. Majelis Komisi KPPU dan Majelis Hakim Mahkamah Agung menggunakan dasar hukum yang berbeda namun mengeluarkan putusan yang sama yaitu terlapor terbukti melanggar sedangkan meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menggunakan dasar hukum yang sama, namun pada pertimbangannya Pengadilan Negeri Makassar cenderung menggunakan pertimbangan ekonomi sehingga mengeluarkan putusan yang berbeda dengan KPPU dan Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Komisi dan Mahkamah Agung sudah tepat, maka perlu dipertahankan. Sedangkan pertimbangan hukum yang digunakan Pengadilan Negeri Makassar keliru, sebab dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Makassar menggunakan pendekatan ekonomi.

2. KPPU sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan praktik persaingan usaha dalam hal penanganan perkara sudah baik, sehingga perlu dipertahankan agar kendala dalam penanganan perkara persaingan usaha tidak lagi menjadi hambatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ash-Shof, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Hasan, Burhanuddin dan Harianto Sugiono. *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Isnaeni, Moch. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Surabaya: Laros, 2008.
- Jusmadi, Ridho. *Konsep Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press, 2014.
- Kagramanto, Budi. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU No 5 Tahun 1999*. Surabaya: Laros, 2008.
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marilang. *Hukum Perikatan*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- R. Saliman, Abdul. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Sadi, Muhammad. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Sinaga, Harjono, Destivano Wibowo. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1984.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widjaja, Gunawan, *Rahasia Dagang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

B. Referensi Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
- Putusan No. 18/KPPU-I/2009
- Putusan No. 01/Pdt.KPPU/2010/PN.Mks
- Putusan No. 141 K/Pdt.Sus/2011

C. Jurnal

- Andi Syafriani, “Perlindungan Konsumen dalam Persaingan Usaha Industri Jasa Penerbangan”, *Jurisprudentie*, Vol 3, No. 1 (2016), hlm. 6 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3669/5495> (Diakses 1 Januari 2019)
- St. Nurjannah, “Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal (Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)”, *Jurisprudentie*, Vol 4, No. 1 (2017), hlm. 2.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3618/3315> (Diakses 1 Januari 2019)

D. Referensi Internet

(<http://www.kppu.go.id>).

<http://repository.unair.ac.id/13732/10/10.%20Bab%203.pdf> diakses pada 19 April 2019.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42929/1/DIAN%20BAHTIAR-FSH.pdf> diakses pada 21 april 2019.

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=78249&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html diakses pada 21 April 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20226/kiat-memahami-putusan-kppu> diakses pada 28 April 2019.



LAMPIRAN

		KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM <small>Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Ronggopeteng Gowa telp (0411) 941679, Fax (0411) 5221433</small>
Nomor	B- 432/SH.01/PP.00.9/01/2019	Samata Gowa, 19 Januari 2019
Sifat	Penting	
Lamp	1 (Satu) Proposal	
H a l	Permohonan Izin Penelitian	

Kepada Yth
Ketua Pengadilan Negeri Makassar
di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Hilmah
N I M	: 10400115021
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

"Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan No. 15/KPPU-1/2009 dan No.01/PdLKPPU/2010/PN.Mks)."

Dengan Dosen Pembimbing :

1. Dr. Marilang, S.H., M.Hum.
2. Erlina, S.H., M.H.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Pengadilan Negeri Makassar** terhitung mulai tanggal 11 Januari 2018 Sampai 11 Februari 2019

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP. 19621016-199003 1 003

Tembusan :

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa (sebagai Laporan)



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEFON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90111

Makassar, 18 Januari 2019

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 03 /HKM/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

Drs. JUNAEDI, SH, MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hilmiyah,
NIM : 10400115021
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. H.M Yasin Limpo No. 38 Samata, Gowa
Judul Skripsi : Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha
(Studi Kasus Putusan No. 18/KPPU-1/2009).

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 9957/S.01/PTSP/2019 Tanggal 08 Januari 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PANITERA



Drs. JUNAEDI, SH, MH
NIP. 196711111982021003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



HILMIAH lahir di Pinrang 5 September 1997, merupakan anak ke dua dari enam bersaudara. Putri dari pasangan Dr. Marilang, SH.M.Hum dan Dra. Suharti ini memulai pendidikan di TK RA. Masrurah tahun 2002 dan menamatkan pendidikan dasarnya di SDN Paccinongan Unggulan Kabupaten Gowa pada tahun 2009. Gadis yang akrab disapa Mia ini melanjutkan Sekolah Menengah Pertamanya di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar pada tahun 2009 hingga tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Model Makassar pada tahun 2012 hingga tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Program Studi Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Perdata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R